

# KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA

Sa'diyah El Adawiyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [sadiya.eladawiyah@umj.ac.id](mailto:sadiya.eladawiyah@umj.ac.id)

## Abstrak

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. upaya penanggulangan kemiskinan tidak perlu terjebak pada faktor-faktor penyebab saja yang bisa jadi bersifat khusus atau kasus tertentu, namun didasarkan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya yang tersedia.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007: 4).Menurut Adisasmita (2006: 144) indikator kemiskinan masyarakat desa yaitu: (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan, (2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas, (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian, (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan, (5) menggunakan cara-cara pertanian tradisional, (6) kurangnya produktivitas usaha, (7) tidak adanya tabungan, (8) kesehatan yang kurang terjamin, (9) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, (10) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, (11) tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, dan yang terakhir (12) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Adapun yang menjadi konsep kemiskinan ada tiga yaitu

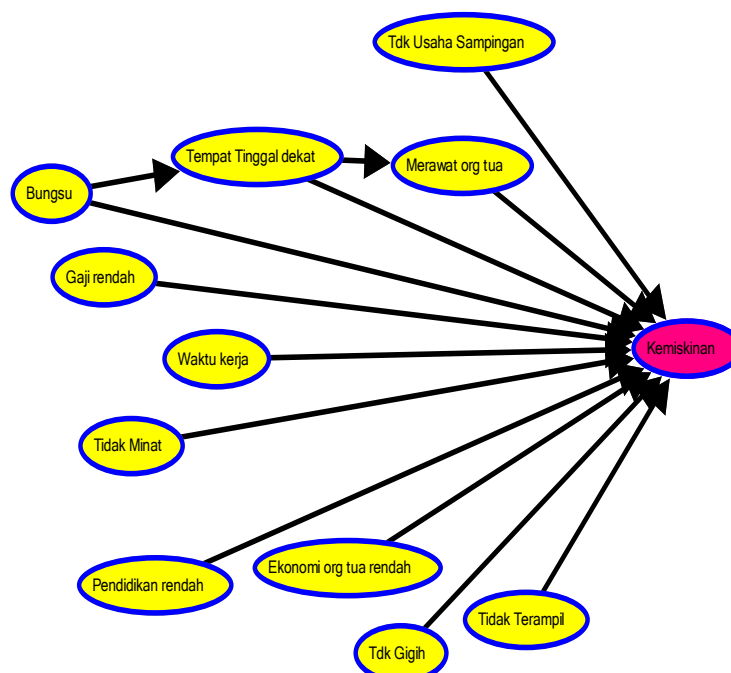
1. kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret, ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan kebutuhan dasar kultur seperti pendidikan, keamanan, rekreasi dan sebagainya, disamping kebutuhan fisik. Konsep dan ukuran kemiskinan itu berbeda- beda di setiap daerah, contohnya kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan. Meskipun demikian konsep ini sangat populer.
2. kemiskinan relatif dirumuskan dengan demensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain, konsep kemiskinan ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kekayaan hidup. Konsep ini juga telah memperoleh banyak keritikan, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan juga beragam dan terus berubah- ubah. Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lainnya. Dan apa yang dianggap layak pada saat ini boleh jadi

tidak layak pada dua- lima tahun kedepan, 3. kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal dan tidak memperhitungkan. Kelompok menurut ukuran kita berbeda di bawah kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu konsep kemiskinan ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya. ( Sunyoto, 2006: 126 ).

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). Menurut Kartasmita (1996), konsep kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu: (a) kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi (*persistent poverty*) (b) kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*); (c) kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*); (d) kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (*accidental poverty*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: status sebagai anak bungsu, tempat tinggal dekat dengan orang tua dan merawat orang tua, tidak ada usaha sampingan, gaji rendah, waktu kerja yang lama, tidak berminat terhadap pekerjaan yang digeluti, tingkat pendidikan rendah, status ekonomi orang tua rendah, tidak gigih dan tidak terampil. Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut secara umum dapat diidentifikasi sebagian besar berasal dari faktor internal individu tersebut.





akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

Menurut Chambers *dalam* Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: *Pertama*, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. *Kedua*, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. *Ketiga*, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. *Keempat*, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2005) yaitu: (a) Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan; (b) Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi; (c) Faktor Kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan (Suharto, 2008b). Sikap-sikap “negatif” seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin; (d) Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

## **FAKTOR-FAKTOR KELUAR DARI KEMISKINAN**

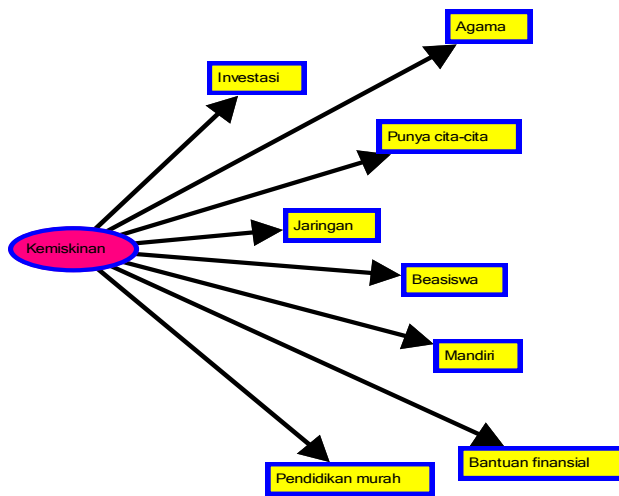
Berdasarkan UU 13 tahun 2003, Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Upaya pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: (a) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (b) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah

dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (e) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (f) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab penyelenggaraan sosial adalah pemerintah dan pemerintah daerah.

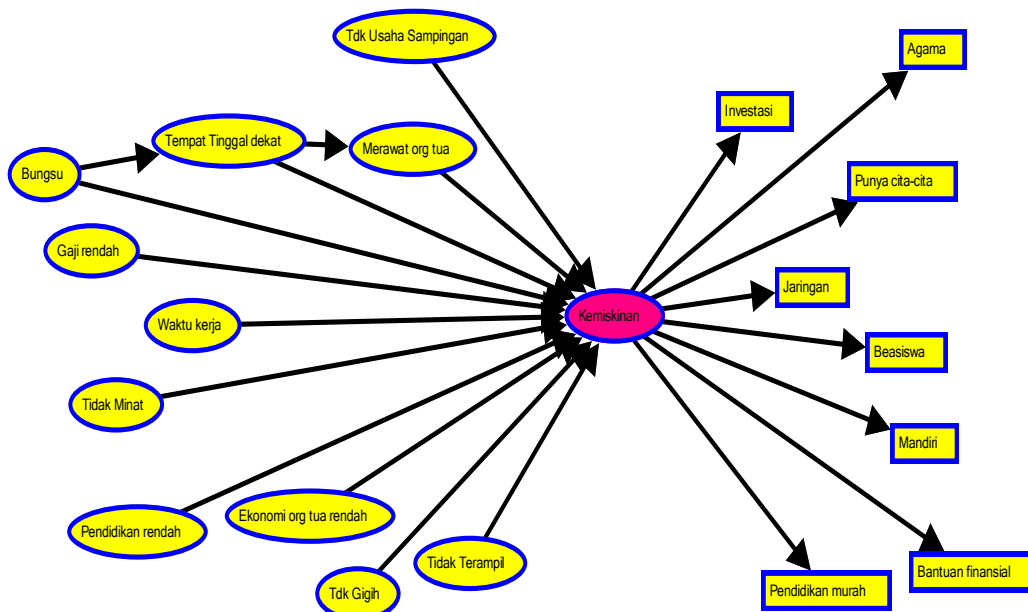
Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut UU 11 tahun 2009, disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: (a) penyuluhan dan bimbingan sosial; (b) pelayanan sosial; (c) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (d) penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (e) penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; (f) penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau (g) penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh komponen pembangunan lainnya, baik itu pihak swasta maupun masyarakat, terlebih lagi dari individu itu sendiri. Untuk terbebas dari lingkaran kemiskinan diperlukan kesungguhan dan kemauan yang kuat dari individu tersebut serta dukungan terencana dari berbagai pihak, terutama dalam akses pemberdayaan secara mandiri maupun melalui keterlibatan pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara responden di lapangan, diketahui bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan adanya jaringan atau kenalan yang membuka akses dalam lapangan pekerjaan, punya cita-cita untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik, belajar agama yang dapat memberikan memotivasi untuk terus berusaha, bantuan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin, mandiri dalam berusaha, bantuan finansial atau modal usaha dan pendidikan murah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan oleh individu tersebut, tetapi diperlukan peran dari pemerintah dan swasta, seperti pemberian beasiswa, penyediaan pendidikan murah dan bantuan finansial dari perusahaan.



Gambar 2. Faktor-Faktor Keluar dari Kemiskinan

Berbagai upaya yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan ternyata tidak serta merta didasarkan pada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan responden yang menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan lebih didominasi oleh karakteristik individu itu sendiri, sedangkan upaya yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan diperlukan peran dari pihak ketiga dan juga dari individu itu sendiri. Sebagai contoh, faktor anak bungsu, bertempat tinggal bersama orang tua, merawat orang tua, ekonomi orang tua yang tidak mendukung, merupakan penyebab kemiskinan yang tidak bisa diatasi dengan menyelesaikan faktor-faktor penyebab tersebut. Berdasarkan hasil temuan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak perlu terjebak pada faktor-faktor penyebab saja yang bisa jadi bersifat khusus atau kasus tertentu, namun didasarkan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya yang tersedia.



Gambar 3. Faktor-Faktor Penyebab dan Keluar dari Kemiskinan

## KESIMPULAN

Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan semakin meningkatnya angka kerja merupakan masalah utama dalam sektor ketenagakerjaan. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan bagi setiap angkatan kerja menyebabkan angka pengangguran meningkat, hal ini semakin diperparah bila terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang berhenti beroperasi. Masuknya Indonesia dalam kesepakatan MEA yang membuka persaingan tenaga kerja secara bebas dengan negara-negara Asia Tenggara semakin menambah beratnya tantangan dunia ketenagakerjaan pada masa kini. Terkait dengan hal tersebut diperlukan sumberdaya yang tidak hanya terdidik tetapi juga terlatih sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dan berdaya dalam keluar dari kemiskinan.

Secara konseptual, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan), motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan (cara pandang yang menganggap orang tua sebagai beban), terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji yang rendah dan waktu kerja yang banyak), dan tidak kreatif. Selanjutnya faktor-faktor yang keluar dari kemiskinan, secara konseptual yaitu berinvestasi atau menabung, taat beragama (tidak putus asa, memiliki harapan untuk berubah), membangun jaringan, dan dukungan dari pemerintah dan swasta. Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah beserta semua komponen pembangunan yang didasarkan pada pemberdayaan dan potensi sumberdaya yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2002. [KBJI] Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chamsyah B. 2008. *Reinventing* Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Trisakti University Press.
- Djojohadikusumo S. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Munker H. H dan T. Walter. 2001. *Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin, dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*. Jakarta : Yakoma-PGI.
- Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Diktat Kuliah Program Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.